



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POTENSI RISIKO RESESI DAN TINGGINYA INFLASI TAHUN 2023

Edmira Rivani

Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Prospek ekonomi dunia tahun depan diperkirakan lebih buruk dibandingkan tahun ini. Beberapa negara kemungkinan masuk ke jurang resesi di tengah inflasi tinggi. Pemburukan perekonomian tersebut dapat memengaruhi pasar tenaga kerja yang sejak beberapa bulan terakhir sebetulnya mulai ramai dengan isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Bank Indonesia melihat situasi ekonomi dunia tahun depan akan semakin sulit. Dalam skenario terburuk bank sentral, ekonomi dunia pada 2023 hanya akan tumbuh 2%, melambat dari tahun ini diperkirakan 3%. Probabilitas resesi juga meningkat, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Tantangan ekonomi tahun depan bukan hanya stagflasi, tetapi mengarah ke reflasi atau kombinasi resesi dengan inflasi tinggi.

Tingginya tingkat inflasi pun membuat bank sentral di beberapa negara meningkatkan suku bunga acuan. Diperkirakan, era suku bunga tinggi akan berlangsung lama dan berlanjut hingga tahun depan. Dampak perlambatan ekonomi dunia ke dalam negeri mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir, terlihat dari ramainya isu PHK. Tren PHK yang berlangsung beberapa bulan terakhir terlihat di industri tekstil dan produk turunannya hingga *startup*. Probabilitas terbesar gelombang PHK tahun depan masih bersumber dari dua sektor lapangan usaha tersebut.

Industri tekstil, termasuk alas kaki, merupakan sektor yang sangat bergantung terhadap ekspor. Namun, pelemahan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa berisiko menyebabkan permintaan terhadap pakaian hingga sepatu dari Indonesia berkurang. Pabrik-pabrik tekstil juga akan menghadapi biaya produksi yang semakin tinggi pada tahun depan. Salah satunya juga akan terpengaruh oleh kenaikan upah buruh. Risiko PHK di *startup-startup* dalam negeri juga masih akan berlanjut tahun depan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan tahapan bisnis pasca pandemi serta kenaikan biaya operasional seiring kenaikan inflasi. Namun, masih belum pasti gelombang PHK di *startup* maupun industri tekstil tahun depan akan lebih besar dari tahun ini. Serta, belum ada tanda-tanda gelombang PHK akan meluas ke sektor lapangan usaha lainnya. Sektor yang penjualan produknya berorientasi di dalam negeri akan relatif lebih aman. Sektor usaha yang tujuan ekspornya ke Cina diperkirakan juga masih akan aman seiring prospek perekonomian negeri tirai bambu tahun depan yang diperkirakan sedikit membaik dibandingkan akhir tahun ini.

Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky, melihat dampak perlambatan ekonomi dunia tahun depan tidak akan signifikan memengaruhi Indonesia. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik juga masih bisa mendekati 5% pada tahun depan, saat banyak negara lain diperkirakan tumbuh lebih rendah. Mengingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tiga kuartal berturut-turut mengalami kenaikan. Pada kuartal I-2022 ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% (*year on year/yoy*), kemudian pada kuartal II-2022 ekonomi di dalam negeri tumbuh 5,44% (*yoy*), dan pada kuartal III-2022 kembali meningkat, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,72% (*yoy*).

Sementara laju inflasi di Indonesia mengalami fluktuatif selama tiga bulan terakhir sejak Agustus hingga Oktober 2022. Inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,69% (yoy), kemudian tingkat inflasi melonjak menjadi 5,95% (yoy) pada September 2022. Adapun pada Oktober 2022 inflasi Indonesia lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 5,71% (yoy).

Gelombang PHK tahun depan juga diperkirakan tidak besar. Hal ini seiring dampak perlambatan ekonomi dunia ke Indonesia yang tidak besar. Meskipun, sektor-sektor yang bergantung pada harga komoditas perlu lebih berhati-hati. Pasalnya, perlambatan ekonomi dunia tahun depan akan menyebabkan harga komoditas termoderasi.

Atensi DPR

Dalam beberapa periode, Indonesia juga pernah mengalami reflasi, salah satunya terjadi pada tahun 2008. Selain dampak melambatnya ekonomi dunia yang dirasakan melalui banyaknya isu PHK di dalam negeri, adanya reflasi di Indonesia berdampak terhadap tertahannya daya beli masyarakat. Satu-satunya jalan untuk bisa meningkatkan daya beli adalah dengan menahan laju inflasi agar tidak melonjak.

Dukungan Komisi XI DPR RI untuk turun ke daerah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), melakukan operasi pasar, dan menenangkan para pedagang, guna menurunkan inflasi *volatile food* sangat diperlukan. Selain itu, koordinasi serta kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan, khususnya dalam menjaga inflasi *administered price*. Salah satu contohnya adalah menjaga kenaikan upah minimum regional (UMR) agar tidak meningkatkan inflasi.

Sumber

Bisnis Indonesia, 22 November 2022;
cnbcindonesia.com, 21 November 2022;
katadata.co.id, 22 November 2022;
Media Indonesia, 22 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022